

37

PEMBERDAYAAN MASJID BERSEJARAH DI KALIMANTAN SELATAN: Sebuah Upaya Transformasi Sosial Berbasis Masjid

Aulia Aziza

UIN Antasari Banjarmasin

auliaaziza@gmail.com

Abstract: Sultan Suriansyah Mosque is a mosque that has a great historical role for the initial milestone of the entry of Islam in the land of South Kalimantan, and historically has historical links with other mosques scattered in the South Kalimantan region. In addition to its function as a place of worship and Islamic symbols, this mosque and its region are embryos of the city of Banjarmasin. In its development the Sultan Suriansyah Mosque is now more focused and improving the development of religious tourism which later became part of an important institution capable of influencing social life both in terms of social, economic and cultural aspects. The process of transformation or life change in a more positive and better direction is very well done with mosque media as a basis for the development of the people.

Keywords: Empowerment, mosque, social transformation.

Abstrak: Masjid Sultan Suriansyah merupakan masjid yang memiliki peran sejarah yang besar bagi tonggak awal masuknya Islam di bumi Kalimantan Selatan, dan secara historis mempunyai keterkaitan sejarah dengan masjid-masjid lain yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan. Di samping fungsinya sebagai tempat ibadah dan syiar Islam, masjid ini dan kawasannya merupakan embrio adanya kota Banjarmasin. Dalam perkembangannya Masjid Sultan Suriansyah kini lebih memfokuskan dan meningkatkan pengembangan wisata religi yang kemudian menjadi bagian dari institusi penting yang mampu memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Proses transformasi atau perubahan kehidupan ke arah yang lebih positif dan lebih baik sangat baik dilakukan dengan media masjid sebagai basis pembinaan umat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, masjid, transformasi sosial.

A. Pendahuluan

Masjid bagi masyarakat Islam berfungsi sebagai pusat peribadatan, lebih tepatnya merupakan institusi keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual, social dan kultural umat Islam. Dimana ada umat Islam maka disitu tentunya ada masjid. Hal ini sejalan dengan langkah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang lebih dahulu dilakukan beliau adalah membangun masjid Quba, kemudian mendirikan shalat berjamaah bersama para sahabat. Islam menempatkan masjid dalam posisi yang strategis. Secara umum masjid memiliki banyak fungsi antara lain bidang social, pendidikan, ekonomi dan juga mampu menjadi institusi pemersatu umat. Masjid di zaman Rasulullah bukan hanya sebagai tempat ibadah semata mata, tetapi juga sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Di masjid Rasulullah mengajarkan bermacam macam ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu al-Qur'an. Dimasjid juga Rasulullah mengajarkan berbagai pola dan system bermasyarakat, ekonomi, social dan budaya. Masjid pun menjadi tempat Rasulullah membentuk dan membina umat Islam.

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrument social masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya. Baik fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya.

Secara kultural, masjid di pandang sebagai institusi yang baik, bermoral dan terpercaya karena kesan keagamaan yang melekat pada masjid. Tentu hal ini merupakan modal tersendiri bagi masjid yang tidak dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Modal khas ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh para pengurus masjid untuk memaksimalkan peran masjid dalam menanggulangi problem social yang ada.

Menurut ahmad Sutarmadi, masjid bukan hanya sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang lebih luas, mencakup bidang pendidikan agama, bidang peningkatan hubungan social kemasyarakatan bagi para jamaah dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi local yang tersedia.¹ Sehingga konsep Optimalisasi fungsi masjid disini menjadi penting disini karena dapat memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masjid untuk kesejahteraan umat Islam.

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2015 tercatat ada 2589 masjid yang tersebar di Kalimantan Selatan, namun kebanyakan masjid tersebut belum berfungsi secara optimal, khususnya pada Masjid Sultan Suriansyah yang merupakan masjid bersejarah yang paling menjadi awal masuknya Islam di bumi Kalimantan Selatan. Optimalisasi fungsi masjid di Kalimantan Selatan selama ini dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat selain sebagai tempat ibadah juga pada pelayanan social bidang pendidikan, hal ini dapat dilihat bahwa pada setiap masjid selalu ada TK/TP Al-Qur'an dan pengajian rutin. Padahal masjid merupakan pranata social yang menjalankan fungsi interaksi sosial yang mampu memberikan berbagai pelayanan sosial, diantaranya sebagai pusat pelayanan sosial bidang ekonomi dan pelayanan bidang kesehatan.

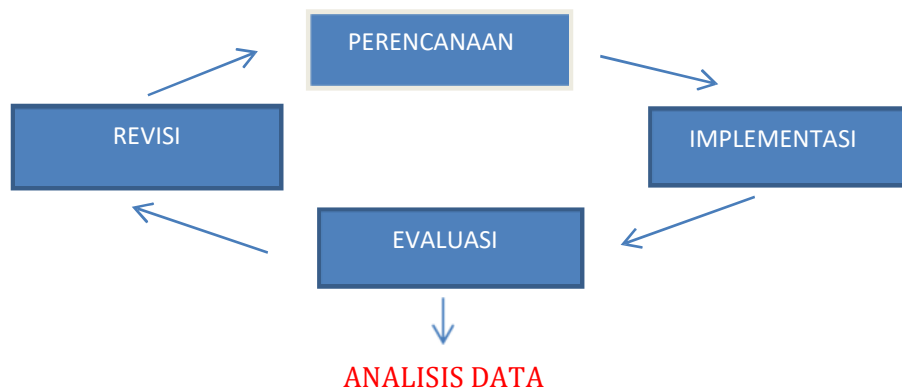
Untuk menjawab problem umat yang semakin meningkat, umat Islam perlu kembali ke Masjid. Masjid dapat menjadi sentral kekuatan umat, sehingga keberadaan masjid tidak ditentukan oleh kemegahan bangunan masjid semata. Banyak ditemukan masjid yang besar, namun sepi jamaah dan minim kegiatan khususnya masjid masjid yang jauh dari pusat kota. Sedangkan masjid di pusat pusat kota terutama yang ada di ibukota kabupaten di Kalimantan Selatan memiliki kegiatan rutin yang cukup banyak yang aktif dengan berbagai kegiatan.

Berangkat dari kenyataan ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam. Tujuannya untuk lebih mengetahui eksistensi, potensi serta strategi optimalisasi fungsi masjid. Oleh karena ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh dalam optimalisasi fungsi masjid ini yaitu melakukan *identifikasi masalah social dan analisis kebutuhan*. Begitu banyak masjid yang berhasil di bangun di Kalimantan Selatan yang dijadikan sebagai pusat peribadatan, namun masih belum memberikan pelayanan optimal bagi jamaahnya pada empat bidang social, yaitu pada bidang pendidikan, social, ekonomi dan bidang kesehatan, bahkan dalam bidang pendidikan agama bagi anak anak pun belum memberikan pelayanan yang prima, sebab pendidikan agama di masjid belum dikelola dengan baik, sehingga belum menghasilkan out put dan out come lulusan yang terdidik agama dengan mutu dan kualitas yang optimal. Disamping itu perlu adanya *penguatan kelembagaan*, berupa penyelenggaraan workshop dan pelatihan. Kemudian untuk memaksimalkan optimalisasi fungsi masjid ini juga diperlukan pendampingan penyusunan rencana aksi.

Terdorong dari kenyataan diatas, penulis mencoba untuk melakukan riset dengan judul "Pemberdayaan Masjid di Kalimantan Selatan (Sebuah Upaya Transformasi Sosial Berbasis Masjid).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang bersifat partisipatoris dan berorientasi aksi. Secara garis besar, proses penelitian ini merupakan proses yang bersifat siklus, dimana rancangan awal penelitian mengalami perbaikan dan pengayaan (enrichment) selama masa tertentu, hingga diperoleh satu pola penelitian yang tetap. Yang dapat dilihat pada pola siklus proses penelitian sebagai berikut :



Selama proses penelitian berlangsung ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

- 1) Tahap persiapan
Tahap persiapan ini ada dua hal yang perlu disiapkan, pertama penyiapan petugas yaitu community worker. Sedangkan persiapan kedua adalah penyiapan lapangan yaitu melakukan studi kelayakan lapangan.
- 2) Tahap Asesment
Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap masalah dan sumberdaya yang dimiliki klien atau masyarakat. Assessment ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan penilaian SWOT
- 3) Tahap perencanaan program
Pada tahap ini agen perubahan mencoba melibatkan masyarakat untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan berusaha mencari solusi terhadap masalah tersebut.
- 4) Tahap formulasi Rencana Aksi
Pada tahap ini agen perubah membantu kelompok masyarakat untuk menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Formulasi rencana aksi dirumuskan oleh petugas dengan masyarakat.
- 5) Tahap Pelaksanaan program dan kegiatan
Pada tahap ini agen perubah membantu kelompok masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan
- 6) Tahap Evaluasi
Pada tahap ini agen perubah bersama peserta dari kelompok masyarakat melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan dan mengawasinya.
- 7) Tahap Terminasi
Pada tahap ini dilakukan pemutusan hubungan kerja secara resmi antara pekerja social dengan masyarakat (Isbandi Rukminto Adi, hal 251-258). Tahap terminasi pada program pemberdayaan dilaksanakan diakhir berupa focus Group Discussion sebagai program evaluasi terhadap seluruh kegiatan.

C. Agama dan Misi Perubahan

Transformatif adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka perubahan social atau penelitian yang terintegrasi dengan aksi pemberdayaan dengan target adanya perubahan mindset, sikap perilaku, pola pikir dan budaya masyarakat sehingga menghasilkan transformasi social yang sejalan dengan dinamika zaman.

Dalam studi studi tentang transformasi sosial dikenal istilah "pemberdayaan" (empowerment), yang merupakan antitesis dari konsep "pembangunan" (development). Konsep "pembangunan" (development) lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang top down, elitis, sedangkan "pemberdayaan" lebih bersifat bottom up, berbasis kepentingan kongkret masyarakat (Aziz dalam Kusnadi, 2006: 1). Hadirnya konsep "pemberdayaan" memberikan sesuatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. Selama ini konsep pembangunan yang diusung oleh rezim Orde Baru, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung baik dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaan proses pembangunan tersebut. Hal ini didasarkan pada filosofi pembangunan (development) yang selalu mengedepankan prinsip top down, dimana negara begitu dominan dalam pembangunan itu sendiri. Negara-negara tersebut menganut model pembangunan pertumbuhan cepat (rapid growth development proses). Walaupun negara berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi model pembangunan ini tidak didukung oleh kemampuan tabungan dan investasi domestik ini sangat rapuh terhadap gejolak perubahan ditingkat global (Faqih, dalam Kusnadi, 2006: 2). Rapuhnya model pembangunan seperti ini nampak jelas ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 (Chambers dalam Agus, 2006).

Pemberdayaan (empowerment) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu bersifat "people centered participatory, empowering and sustainable" (Agus, 2006:140).

Pemberdayaan dipandang merupakan konsep ideal karena selalu mengedepankan iklim komunikatif, kondusif, dan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang dan maju secara bersama-sama. Oleh karena itu pemberdayaan bukanlah merupakan upaya pemaksaan kehendak atau proses yang dipaksakan atau kegiatan yang diprakarsai dari pihak luar. Dengan pemberdayaan dapat berpengaruh terhadap terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Pranarka dan Vidhyandika dalam Harry, 2006: 1).

Proses pemberdayaan idealnya juga dapat dilakukan di masjid-masjid, mengingat begitu besarnya aset yang dimiliki masjid salah satunya adalah dana umat yang terkumpul baik dari zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya serta dana lainnya.

D. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (empowerment) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep elit, kekuasaan, anti kemapanan, ideologi, pembebasan, dan civil society (Pranarka dan Vidhyandika dalam Harry, 2006: 2)

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai depowerment dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idil manusia dan kemanusiaan (humanisme). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Harry, 2006: 4). Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Clarke, dalam Harry, 2006:5).

Sementara itu pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat (Aziz dalam Kusnadi, 2006: 1).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, konsep pemberdayaan (empowerment) dianggap merupakan antitesis dari konsep pembangunan (development). Konsep pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat top down, elitis dan jauh dari nilai-nilai keadilan, sedangkan pemberdayaan lebih bersifat bottom up (Kusnadi, 2006: 6), lebih mengedepankan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sikap aspiratif inilah yang dimaknai sebagai upaya menggali dan menemukan persoalan dari masyarakat sendiri. Artinya, masyarakatlah yang menemukan permasalahannya sendiri dan kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut.

Menurut Kusnadi (2006) bahwa filosofi pemberdayaan pada masyarakat dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) manusia dan Allah Yang Maha Kuasa (2) manusia dengan manusia (3) manusia dengan alam. Ketiga jenis hakikat hubungan vertikal –horizontal ini melahirkan prinsip-prinsip kehidupan sebagai berikut: Satu, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan jagad raya dengan segala isinya semata-mata untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia dunia dan akhirat. Pada akhirnya nanti, amanah ini harus dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh manusia di hadapan Sang Pencipta. Prinsip ini akan mendorong pikiran dan sikap manusia untuk menghormati dan menghargai seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, khususnya manusia dan sumber daya alam, serta berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dua, manusia menyadari dan mengakui bahwa sumber daya alam yang ada di lingkungan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara baik dan bijaksana untuk kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidupnya. Prinsip ini melahirkan sikap menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan. Tiga, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat mengatasi sendiri seluruh persoalan kehidupannya tanpa bantuan orang lain. Prinsip ini akan melahirkan sikap untuk bekerja sama, kebersamaan, saling membantu atau gotong-royong dan persatuan. Empat, manusia adalah makhluk berbudaya yang memiliki identitas dan potensi sosial-budaya sebagai basis eksistensinya. Prinsip ini melahirkan sikap menghargai terhadap nilai-nilai budaya, pranata (kelembagaan) sosial, dan pengakuan akan eksistensi suatu masyarakat. Lima, manusia memiliki kehendak dan hak untuk mencapai kualitas kehidupan yang sempurna lahir batin. Prinsip ini akan melahirkan sikap apresiatif terhadap etos kerja, kreativitas, dan aspirasi sosial yang berkembang. Enam, manusia memiliki martabat atau harga diri, otonomi diri, dan kewajiban-kewajiban sosial dalam kehidupannya. Prinsip ini melahirkan sikap menghargai kebebasan sosial yang bertanggungjawab dan konstruktif, mengembangkan ruang demokratisasi dan dialogis, serta menghormati keinginan-keinginan dan cita-cita warga masyarakat. Tujuh, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan dari negara, baik secara sosial, budaya dan ekonomi maupun politik-kebijakan.

Tujuh prinsip dasar pemberdayaan tersebut memiliki sifat universal sehingga daya dukung dan keberterimaan masyarakat dimanapun mereka berada cukup besar. Norma-norma keagamaan, adat-istiadat, nilai-nilai tradisi, etika sosial masyarakat, dan tata normatif kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ranah yang memungkinkan ketujuh prinsip tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam proses pemberdayaan masyarakat (Edi Suhartono, 2005: 59). Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan

aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sebagaimana digambarkan oleh Comton dan Galaway yang mengetengahkan pendapat Lippit dan Westley dalam *Social Work and Processes* (1979:109) berpendapat, bahwa dinamika perilaku masyarakat yang membentuk kebudayaan khas yang memantulkan adalah karena kebutuhan yang sama akan tujuan yang hendak dicapai yang dikokohkan oleh hubungan fungsional dan pilihan sosial yang teruji serta generalisasi kepentingan yang lebih *transformatif* dan stabil untuk dijadikan norma- norma kehidupan dalam masyarakat (Saebani, 2007: 2).

Menurut sosiolog, fungsi transformatif yang dilakukan dalam aktivitas keagamaan berarti mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk kehidupan baru (Hendropuspito, 1983: 56). Nilai-nilai yang telah diperoleh oleh para jamaah itu telah *mengubah kesetiaan* jamaah dari kebiasaan lama ke dalam kebiasaan baru dan membentuk kepribadian. Hal itu dapat diidentifikasi para jamaah yang dulunya tidak atau jarang sekali berjamaah kini telah rajin mengikuti salat wajib dengan berjamaah, yang dulu jarang sekali mengikuti pengajian, kini telah banyak dan selalu mengikuti pengajian-pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid. Sebagai contoh yang sederhana dalam fenomena ini dapat dilihat kalau dulu sebelum mendapat pencerahan, orang cenderung mudah konflik atau mudah renggang dengan sesama tetangga, kini setelah pencerahan terjadi fenomena rukun, saling komunikasi dan silaturahmi, bahkan kebersamaan dan akrab selalu dan sering terlihat diantara anggota masyarakat, terlebih dalam acara-acara kegiatan keagamaan baik *ibadah mahdhah*, maupun *ibadah ghairu mahdhah*, terlebih dalam keterlibatan kepanitiaan. Kebersamaan itu terlihat dalam acara-acara pengajian-pengajian, penerimaan dan penyaluran zakat mal dan fitrah, penyembelihan dan penyaluran hewan qurban, peringatan-peringatan hari-hari besar Islam, kegiatan pelatihan manasik haji maupun *walimatussafar*, maupun *walimatul urusy*. Dari realitas ini dapat disimpulkan bahwa proses transformasi atau perubahan kehidupan ke arah yang lebih positif dan lebih baik sangat baik dilakukan dengan media masjid sebagai basis pembinaan umat.

E. Masjid Sultan Suriansyah dalam Sejarah

Masjid sultan Suriansyah yang berada di Kelurahan Kuin Utara sekitar tiga kilometer dari pusat kota Banjarmasin tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan masjid yang mempunyai nilai sejarah sangat tinggi dan merupakan asset budaya nasional.

Pada tahun 1526 yang merupakan masa pemerintahan Pangeran Samudera sebagai Raja Pertama kerajaan Banjar, pada masa itu Pangeran Samudera menjadi raja pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suriansyah dimana pengislaman beliau dipimpin oleh ulama besar yang bernama Khatib Dayyan yang sengaja didatangkan dari kesultanan Demak di pulau Jawa. Khatib Dayyan mempunyai nama asli Syekh Syarif Abdurrahman yang merupakan buyut dari sunan Gunung Jati, salah seorang dari Walisongo yang terkenal sebagai penakluk Kerajaan Padjajaran. Menurut HA Tajuddin Noor Nasth, Khatib Dayyan merupakan diplomat sekaligus panglima perang dan konon ketika bertolak ke tanah Banjar beliau dibekali ilmu perang dan juga ilmu batin oleh sang kakek buyut. Sehingga dengan kehendak Allah dan kesaktian Khatib Dayyan, ketika Pangeran samudera berhadapan dengan Pangeran Tumenggung yang masing masih berada di atas perahu perang dan ketika Pangeran Tumenggung dipersilahkan untuk lebih dahulu menyerang Pangeran Samudera, bukannya tombak sakti yang dia layangkan melainkan air mata deras dan langsung merangkul Pangeran Samudera sehingga perang Banjar versi ini berakhir damai, bersatu dan menjadi Islam.

Yang pertama dilakukan oleh sultan Suriansyah kala itu adalah membangun sebuah tempat pusat peribadatan yakni sebuah Masjid di tepi sungai Kuin.

Pemilihan lokasi yang dikelilingi oleh aliran sungai, menggambarkan bukan hanya Kuin sangat dekat dengan sungai dalam kehidupan masyarakatnya, tetapi juga untuk memudahkan jamaah mengambil air wudhu.

Ketika pertama kali dibangun masjid Sultan Suriansyah ini merupakan bangunan dengan tipe panggung seperti halnya rumah yang ada di kawasan Kuin pada saat itu., dengan atap tumpang tiga (tumpang talu). Atap tumpang tiga ini merupakan pengaruh kuat dari masjid Demak karena dikerjakan oleh para tukang yang di bawah pengawasan Khatib Dayyan.

Di samping fungsinya sebagai tempat ibadah dan syiar Islam, masjid ini merupakan tonggak awal masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan kawasannya merupakan embrio adanya kota Banjarmasin.

F. Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid

Secara luas masjid seharusnya harus bisa berfungsi secara optimal, bukan saja sebagai tempat ibadah, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain. Masjid sebagai pusat dakwah, dan pendidikan dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:

1. Sebagai tempat ibadah shalat, zikir dan i'tikaf. Sejak dahulu shalat berjamaah dan shalat jum'at dipusatkan di masjid. Begitu pula majelis-majelis zikir secara berkelompok dan i'tikaf di bulan Ramadhan. Tempat kegiatan dakwah dan pendidikan. Dakwah bukan hanya dalam bentuk khotbah tetapi juga berupa ceramah, diskusi dan majelis taklim. Sedangkan pendidikan yang harus dikembangkan di masjid adalah : pengajian dasar al-Qur'an dan pengajian lanjutan (tajwid dan lagu) serta pembacaan kitab-kitab agama seperti kitab kuning.
2. Perpustakaan dan taman bacaan. Hal ini perlu diadakan untuk meningkatkan semangat membaca.
3. Pengelolaan zakat. Dengan lahirnya UU No.38 th.1999 tentang pengelolaan zakat, maka seharusnya masjid-masjid memiliki pengurus tetap yang menangani zakat; jadi bukan hanya sebagai panitia seperti selama ini sebab panitia sifatnya hanya sementara. Zakat harus dikelola secara profesional dan berkesinambungan.
4. Pembinaan calon haji. Menurut pengalaman dan berbagai informasi, jemaah haji Indonesia sangat rendah pengetahuannya tentang manasik haji. Seharusnya hal ini diatasi dengan cara pembinaan calon haji di masjid.
5. Pembinaan kegiatan sosial, Kesehatan Lingkungan dan lain- lain, seperti: a) pemberian santunan fakir miskin melalui ZIS. b) pembinaan masyarakat dhuafa' seperti tukang becak
6. penyelenggaraan pengurusan jenazah (memandikan, mengkafani, dan menshalatkan). Untuk itu masjid perlu ada ruang khusus tempat memandikan jenazah, keranda/usungan dan mobil jenazah. Bahkan di masjid perlu disediakan kain kafan dan tenaga yang mahir menangani tugas memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.
7. Pembinaan ekonomi lemah, Pengusaha kecil, pedagang kaki lima, penjual di pasar dan wiraswastawan perlu diberi pembinaan dengan jalan pemberian informasi pasar, kiat-kiat berusaha, tatacara memperoleh kredit di bank dan lain-lain yang dapat dilakukan melalui masjid atau membangun Koperasi Masjid

Interview mendalam digunakan untuk mengungkap, motivasi jamaah masjid Sultan Suriansyah atau masjid Kuin ini dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh takmir masjid baik yang berkaitan dengan aktivitas ibadah *mahdhah* seperti salat-salat wajib, maupun salat sunnat seperti salat sunat *rawatib*, salat tahajud dan sebagainya. Sementara teknik observasi peneliti gunakan untuk melihat dan mencrossceking realita di lapangan (masjid) untuk melihat fenomena yang terjadi secara empirik. Dan karena peneliti juga sebagai nara sumber atau penceramah aktif khusus untuk pengajian ibu ibu sekaligus juga peserta aktivitas bersama dengan jamaah yang lain, maka observasi yang penulis lakukan adalah observasi partisipan atau observasi berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan ini.

Dari kedelapan peran masjid sebagaimana dikemukakan di atas, Masjid Sulthan Suriansyah atau Masjid Kuin telah melaksanakan sebagian besar, bahkan kini lebih memfokuskan dan meningkatkan pengembangan wisata religi, karena masjid ini memainkan peran sejarah yang besar bagi awal berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan dan punya keterkaitan sejarah dengan masjid masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian yang berbasis pemberdayaan ini penulis juga memfokuskan pada proses terbangunnya kesadaran pengembangan dakwah Islam melalui wisata religi yang berbasis masjid dan pemberdayaan ini memang atas dasar pemikiran bersama dengan pengelola Masjid Sulthan Suriansyah, yang memerlukan pengarahan yang lebih terorganisir karena selama ini selama ini belum terlalu siap untuk menyambut wisatawan muslim, terutama kurangnya sarana yang nyaman dan ramah bagi wisatawan untuk ganti pakaian, mandi dan wudlu, toilet yang bersih, dan perlengkapan shalat yang bersih, walaupun untuk perlengkapan shalat yang bersih ini peneliti dibantu oleh ibu-ibu pengajian dan beberapa orang mahasiswa telah mulai melakukan gerakan mukena bersih dengan secara bergiliran mencuci mukena atau perlengkapan shalat lainnya.

Selain itu sarana informasi berupa leaflet/buku yang menceritakan tentang sejarah masjid dan perkembangannya minimal dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Permasalahan yang seringkali di alami oleh pengelola Masjid Sulthan Suriansyah selama ini adalah ketika wisatawan asing atau mancanegara datang sementara sumber daya mereka tidak ada yang mahir berkomunikasi dengan berbahasa asing dan masih minimnya wawasan sejarah masjid dan berkembangnya Islam terkait dibangunnya masjid tersebut.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, peneliti lebih berupaya melibatkan atau bekerjasama dengan pengelola masjid dan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah sekitar masjid misalnya RT, tokoh masyarakat yang selama ini punya komitmen besar terhadap pengelolaan masjid bersejarah ini.

Hal penting lainnya yang juga dilakukan dalam hal ini adalah penggalangan dana atau fundraising untuk penyelenggaraan program atau kegiatan masjid yang selama ini berjalan secara tradisional, pengelola menunggu kesadaran masyarakat untuk membantu kebutuhan finansial penyelenggaraan kegiatan masjid. Namun kali ini strategi penggalangan dana lebih berorientasi kepada sumber-sumber dana yang bersifat umum seperti dari perusahaan-perusahaan, lembaga pemerintah dan non pemerintah dan dari usaha-usaha lain seperti pengembangan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan agama dan pelayanan sosial di samping mengoptimalkan sumber-sumber keislaman seperti zakat fitrah, zakat mal, infak atau sedekah dan wakaf.

Berdasarkan hasil FGD (*Focus Discussion Group*) yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan pengelolaan sumber-sumber keislaman seperti zakat fitrah, zakat mal, infak atau sodaqoh dan wakaf. Diantara kelemahan tersebut adalah

- 1) Kurangnya pengetahuan agama para pemberi zakat, pengelola zakat dan penerima zakat. Di antara pemberi zakat ada yang memahami bahwa zakat fitrah lebih baik diberikan menjelang shalat Idul Adha. Zakat lebih baik diberikan langsung oleh pemberi zakat (*muzakki*) kepada yang berhak menerimanya (*mustahik zakat*).
- 2) Dana zakat cenderung digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan lainnya. Dana zakat jarang dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti modal usaha, koperasi bersama, beasiswa bagi mereka yang tidak mampu atau kaum dhuafa dan usaha lainnya.
- 3) Diantara para pengelola zakat juga ada yang kurang memahami aspek hukum atau aturan penggunaan zakat fitrah, zakat mal, infak atau sedekah dan wakaf. Kekurangan pengetahuan ini mengakibatkan pemberdayaan zakat tidak mengenai sasaran.
- 4) Di samping itu kelemahan pengelolaan zakat juga dapat dilihat pada akuntabilitas, pengelolaan terkesan kurang transparan akibatnya para muzakki kurang percaya.
- 5) Hal lain yang ditemukan adalah kurang jelasnya rencana penggunaan dana zakat oleh para pengelola zakat
- 6) Manajemen pengelolaan zakat masih cenderung menunggu para muzakki untuk datang sendiri ke masjid menyerahkan zakat. Muzakki yang disentuh hanya sebatas lokal, wilayah RW dan individual. Pengelola belum berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas dan mencari dana keluar selain zakat formal.

G. Analisis

Pendekatan dalam pemberdayaan adalah salah satu unsur yang ikut membantu kelancaran program ini. Penggunaan pendekatan keislaman menjadi unsur penting dalam pemberdayaan berbasis masjid ini. Pendekatan keislaman ini tidak hanya melihat dan melibatkan masyarakat, lembaga atau institusi yang ada di sekitar masjid tapi juga melibatkan komunitas lain yang dianggap diperlukan untuk kepentingan bersama sebagai umat Islam.

Masjid yang selama ini dipahami sebagai sarana ibadah formal semata (tempat shalat, ceramah dan mengaji kitab) perlu dikembangkan sebagai sarana sosial lainnya seperti sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat membicarakan dan menyelesaikan masalah masalah sosial lainnya.

Lembaga atau institusi yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah lembaga yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat Islam seperti Dompot Du'afa, MUI, tokoh tokoh masyarakat seperti mantan wali kota Banjarmasin H. Muhiddin dan beliau ini punya komitmen yang besar untuk perkembangan kegiatan masjid Sulthan Suriansyah. Lembaga lembaga ini dipandang mempunyai kepedulian terhadap masyarakat Islam karena masyarakat Islam merupakan masyarakat yang banyak mengalami kesulitan hidup yang disebabkan karena kelemahan pemahaman agama, kekurangan pendidikan dan pendapatan yang rendah atau kemampuan sosial ekonomi yang rendah. Program pemberdayaan ini mencoba menggali dana dana sosial.

Metode yang digunakan dalam setiap kegiatan pemberdayaan menggunakan cara cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan metode ini diharapkan dapat mendekatkan kesadaran masyarakat sehingga komunitas masjid dapat memberikan pelayanan agama dalam arti yang seluas luasnya. Masjid selain sebagai sarana atau tempat ibadah formal juga dapat menjadi sentral kebudayaan Islam dan sarana ibadah sosial lainnya.

H. Kesimpulan

1. Masjid sultan Suriansyah yang berada di wilayah Kelurahan Kuin Utara merupakan masjid pertama dan tonggak awal masuknya Islam di Kalimantan selatan yang hingga saat ini selain sebagai tempat ibadah juga punya nilai-nilai sejarah serta banyak menyimpan nilai nilai sosial budaya masyarakat banjar sejak dulu
2. Out put dan out come dari keseluruhan proses pemberdayaan berbasis masjid ini perlu adanya penguatan kelembagaan (*Institutional Capacity Building*) dan mengembangkan jaringan kemitraan (*lingkageDevelopment*).

Daftar Pustaka

- Ayub Muhammad, E, *Manajemen Masjid, Petunjuk praktis bagi para pengurus*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Ife, Jim, *Community Development, Creating Community Alternative-vision, analysis dan practice*, Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Meleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nurdin, Ali, *Qur'anic Society, menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al Qur'an*, Jakarta, Erlangga, 2006
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Gazalba, Sidi, 1989, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan*, Jakarta, 1989.
- Hendropuspito, D, OC. 1983, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, BPK Gunung Mulia.

- O'dea Thomas F. 1996, Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal. 'terj." Tim Penerjamah Yasogama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani Beni Ahmad. 2007. Sosiologi Agama, Kajian tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kaulitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Rosdakarya.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003. Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung Rosdakarya.